

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Edisi I. Jakarta: Kencana, 2017.
- Arif, Syaiful. *Falsafah Kebudayaan Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Z A M Husein. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Azhary, H. *Negara hukum Indonesia suatu analisis yuridis normatif tentang unsur-unsurnya*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia-UI Press, 2008.
- Black, Henry Campbell. *Black's law dictionary*. St. Paul-Minnesota: West Publishing Company, 1990.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Raja Grafindo. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Emzir, M. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis data*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. diterjemahkan oleh M.Khozim. Cet. Ke-4. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Friedmann, Wolfgang, dan Muhamad Arifin. *Teori dan Filsafat Hukum I: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 1991.
- Fuller, L L. *The Morality of Law*. Yale: Yale University Press, 1977.
- Guritno, Adi Djoko, dan Meirani Harsasi. *Pengantar Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management)*. Ekma. Vol. 4371. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Hatiwiningsih, dan Lushiana Primasari. *Hukum Pidana Ekonomi*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2015.
- Hiariej, Eddy O S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida, dan A H S Attamimi. *Ilmu Perundang-*

- undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Jeddawi, Murtir. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Total Media, 2012.
- Jonaedi Efendi; Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien)*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Khairandy, Ridwan. *Iktikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*. 1 ed. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Lubis Solly, M. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar. Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 1987.
- . *Filsafat sebagai ilmu kritis*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 1998.
- Mamduh M. Hanafi. *Manajemen Risiko*. Modul EKMA. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Marbun, S.F, dan Moh. Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Kencana*. Ed. Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Cetakan IV. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- . *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. 7 ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Munir, Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Zul Pahmi Lubis, dan Ahmad Faury Iwan. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2017.
- ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Neergaard, Ulla, Catherine Jacqueson, dan Grith Skovgaard Ølykke. *Public Procurement Law : Limitations, Opportunities and Paradoxes. The XXVI FIDE Congress in Copenhagen, 2014*. Vol. 1. Copenhagen: DJØF Publishing, 2014.
- Notohamidjojo, Oeripan. *Makna negara hukum bagi pembaharuan negara dan*

- wibawa hukum bagi pembaharuan masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970. Digitalisasi 17/9/2010.
- . *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Patrik, P. *Asas iktikad baik dan kepatutan dalam perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 1986.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- . *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Cetakan II. Bandung: Nusa Media, 2019.
- . “Kejahatan Pertambahan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat.” *Perspektif* 21, no. 1 (2016): 23–33.
- . *Pembaharuan hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Malang: Setara Press, 2017.
- . *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- . *Sistem Hukum Pancasila: Sistem, Sistem hukum, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia : Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusamedia, 2016. https://books.google.co.id/books?id=P_xhuWEACAAJ.
- . *Sistem Hukum Pancasila: Sistem, Sistem hukum, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia : Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusamedia, 2016.
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Prasetyo, Teguh, dan Arie Purnomosidi. *Membangun hukum berdasarkan Pancasila*. II. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Penerbit Buku Kompas, 2009. <https://books.google.co.id/books?id=SvNV7H1Dsf0C>.
- . *Ilmu hukum*. V. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Membedah hukum progresif*. Diedit oleh I Gede A.B Wiranata. I. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- . *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- . *Penegakan Hukum Progresif*. Diedit oleh Aloysius Soni BL de Rosari. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- . *Biarkan Hukum Mengalir*. Diedit oleh Bagus Darmawan. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008.
- Ramli, Samsul. *Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Cetakan 1. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2014.
- Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Saija, Ronald. *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Salim HS. *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sidharta, B. Arief. *Etika Hukum*. Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2008.
- . *Refleksi tentang struktur ilmu hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Simanjuntak, Ricardo. *Hukum Kontrak-Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Kontan Publishing, 2011.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1 ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- . *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1987.
- Sudargo, Gautama. *Pengertian tentang negara hukum*. Bandung: Alumni, 2005.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Prenada Media, 2015. <https://books.google.co.id/books?id=OEC2DwAAQBAJ>

- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.
- Syamsudin, M. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Theo, Huijbers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Tim Visi Yustisia. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. I. Jakarta: VisiMedia, 2016.
- Tuanakotta, Theodorus M. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Salemba, 2009.
- Wignjosobroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional-Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- . *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press, 2013.
- William T. Major. *Hukum Kontrak*. Diedit oleh Purwanto. 1 ed. Bandung: Nuansa Cendikia, 2018.
- Wirjono, Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Wuisman, JJJM. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Jilid 1: Asas-asas*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1996.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Yahya, Marzuki, dan Endah Fitri Susanti. *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Laskar Aksara, 2012.

Peraturan

- ISO. “International Organization for Standardization ISO 31000: Risk management - Principles and guidelines.” *ISO 31000*. Geneva: International Organization for Standardization, 2012. ISO 21500: Guidance on Project Management., 2009. www.iso.org.
- . “International Organization for Standardization ISO 31000: Risk management - Principles and guidelines.” *ISO 31000*. Geneva: International Organization for Standardization, 2012. ISO 21500: Guidance on Project Management., 2009.
- Mahkamah Agung RI. “Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018.” *Direktori Putusan Mahkamah Agung*. Last modified 2018. Diakses Juli 19, 2021.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae84bf603f56082e7313635393133.html>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta. Indonesia, 2002.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Indonesia: Lembaran Negara RI, 2020.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2019.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Indonesia, 1999.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia No.5, 2014.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia. Indonesia, 2014. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/30TAHUN2014UU.HTM>.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2004.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2003.

———. *Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia, 1999.

———. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229. Jakarta, 2018.

———. *Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 74, 2010.

———. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia No.33, 2018. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018>.

———. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI, 2010.

- . *Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Indonesia: Lembaran Negara RI, 2021.
- . *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Presiden RI, 2007.
- . *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1687, 2014.
- . *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016*. Menkominfo, 2016.
- . *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi*, 2004.
- Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan No.191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan*, 2008.
- Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. *Surat Edaran Nomor : 339/3549/PBJ-TU.P/IX/2018 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat*. Bupati Kutai Barat, 2018.
- Peraturan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. *Lampiran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015*. Indonesia, 2015.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 762, 2018.

Artikel Jurnal

- Abul Hassan, Sitti Hasinah, Suhaiza Ismail, dan Hawa Ahmad Abdul Mutalib. "Public procurement in Malaysia: objectives and procurement principles." *Journal of Economic and Administrative Sciences* (Januari 1, 2020). <https://doi.org/10.1108/JEAS-03-2020-0033>.
- Adiasih, Ning. "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas." *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 1 (2017).
- Alkostar, Artidjo. "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Department of Law, Faculty of Law, Islamic University of Indonesia* 16 (2009): 155–179.

- Allott, Anthony. "The Effectiveness of Law:" In *Symposium on International Perspectives of Jurisprudence*, 15:34–54. Valparaiso, Indiana, USA: Valparaiso University Law Review, 1981. <https://scholar.valpo.edu/vulr/vol15/iss2/1>.
- Anggara, Sahya. "Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal." *Jispo* 1, no. 1 (2013): 1–11.
- Ansari, Muhammad Insa. "Penerapan Pakta Integritas pada Pengadaan Barang/Jasa untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih." *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 3 (2016): 385–401.
- Apri Listyanto. "Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Reformation Regulation of Goods and Services Government Procurement)." *Jurnal Rechtsvinding-Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 113–133. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/109>.
- Arfanti, Maria Avilla Cahya. "Pelaksanaan Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Persekongkolan Tender (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Pengawasan Bangunan Kota Malang)." *Jurnal Universitas Brawijaya* (2014): 1–22.
- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1-April (2020): 66–82.
- Arifin, Zaenal. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *FH UNPAB* 5, no. 5 (2017): 54–63.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatig Overheidsdaad) Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 1 (Agustus 10, 2018): 265–286.
- Butarbutar, Russel. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi." *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 9, no. 1 (2017): 51.
- H. Bayi Priyono. "Azas Legalitas Sebagai Pilar Negara Hukum." *Jurnal Transformasi Pemerintahan* 5, no. 2 (2013): 161–169.
- Hamkah, dan Hadi Purwanto. "Kajian Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal Simetrik* 8, no. 2 (2018): 107–112.
- Harisa, Novran. "Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Arbitrase Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa." *Aktualita* 1, no. 1-Juni (2018): 261–279.
- Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." *Publik* 2, no. 2 (2014): 78–92.

- Hidayat, Candra Nur. "Efektivitas Hukum Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik." *Pamulang Law Review* 2, no. 1 (2020): 37.
- Indra, Mexsasai. "Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi." *JURNAL ILMU HUKUM* 4, no. 3/ September 2014-Januari 2015 (2015): 138–150. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2778>.
- Isra, Muhammad ; Ilyas ; Adwani. "Perjanjian Pinjam Nama Perusahaan Dalam Pelaksanaan Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Provinsi Aceh." *AT-TASYRI' X*, no. 1 (2018): 1–8.
- Julista Mustamu. "Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Sasi* 17, no. 2 (2011): 1–9.
- Kautsariyah, Siti, dan Sarwono Hardjomuljadi. "Analisis Penyimpangan Pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Secara Elektronik Di Pemerintah Daerah." *Konstruksia* 8, no. 1 (2017): 75.
- Khairandy, Ridwan. "Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak: Super Eminent Principle yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Objektif." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 3 (2008): 343–358.
- Klein, John. "Good faith in International transactions." *Liverpool law review* 15, no. 2 (1993): 115–141.
- Kolamawati, Veronica. "Quo Vadis 'Malpractice' Profesi Dokter Dalam Budaya Hukum Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018): 1–14.
- Kurniawan, Rahmat. "Pengaruh Penciptaan Lingkungan Budaya Jujur Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN di Kota Padang)." *Jurnal Akuntansi* 2, no. 3 (2016): 1–18. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1546/1169>.
- Lestyowati J. "Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja." *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara* (2018): 669–695.
- Mahardika, dan Firman Wijaya. "Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2019): 825.
- Mugasha, Agasha. "Good Faith obligations in commercial contracts." *International Business Law* 27 (1999): 355.
- Muskibah, dan Lili Naili Hidayah. "Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah di Indonesia." *Refleksi Hukum* 4, no. 2 April (2020).
- Nayabarani, Sabrina Dyah. "Membangun Transparansi Pengadaan Barang dan

- Jasa Melalui Peningkatan Peran ICT Dalam Mereduksi Korupsi.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 477–496.
- Nurwullan, Siti, dan Hendrik Fasco Siregar. “Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik.” *Proceedings Universitas Pamulang* 1, no. 1 (2020).
- Pakendek, Adriana. “Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila.” *Jurnal Yustitia* 18, no. 1 (2017): 23–37.
- Pane, Musa Darwin. “Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 147–155.
- Piga, Gustavo. “A fighting chance against corruption in public procurement.” *International handbook on the economics of corruption* 2 (2011): 141–181.
- Pusat LPSE Kementerian Keuangan. “Warta Eproc Publikasi Layanan E-Procurement Kementerian Keuangan Edisi XIX.” *Warta eproc*. Jakarta, 2018.
- Putri, Kania Dewi Andhika, dan Ridwan Arifin. “Tinjauan teoritis keadilan dan kepastian dalam hukum di indonesia.” *Mimbar Yustitia* 2, no. 2 (2018): 142–158. <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1344>.
- Rodiyah. “Urgensi Aspek Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui Model Integrative Regmap-Regulatory Impact Assesment (IRR) dalam Prespektif Sosio Legal.” *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*. Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia-Humas FH UNDIP, 2012.
- Ruslina, E. “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): 1–34.
- Samekto, FX. Adji. “Menggugat Relasi Filsafat Positivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 Januari (2012): 74–84.
- Santoso, Heri, dan Herry Mulyono. “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Metode Pengadaan Langsung pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.” *Jurnal Manajemen Sistem Informasi* 3, no. 4 (2018): 1302–1309.
- Sodikin. “Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 143.
- Sujarkasih, Ronggur Al-Rasyed. “Tinjauan yuridis terhadap perusahaan yang meminjamkan nama badan hukum kepada pihak ketiga.” *Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara* (2020).
- Supriyono. “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam

- Kehidupan Masyarakat.” *Fenomena* XIV, no. 2 November (2016): 1567–1582.
- Susila, Adi. “Mencermati Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.” *AKP* 1, no. 1 (2012): 39–54.
- Susilo, Agus Budi. “Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 291.
- Syahuri, Taufiqurrohman. “Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2016): 243–258.
- Udoyono, Kodar. “E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Di Kota Yogyakarta.” *Journal of Government and Politics* 3, no. 1 (2012): 127–160.
- Watupongoh, Nancy. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Kontraktor Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Di Adpel Bitung.” *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi* I, no. 3 (2013): 1–12.
- Wibowo, Richo Andi. “Mencegah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa : Apa yang sudah dan yang masih harus dilakukan?” *Integritas* 1, no. 1 (2015): 37–60.
- . “Budaya hukum yang memberikan insentif terjadinya korupsi pengadaan barang / jasa serta peran HAN dalam menanggulangnya.” <https://www.researchgate.net/publication/325046372>, no. May (2018).
- . “Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan Odd Court Decisions on Corruption in Procurement and its relation with the Constitution.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 1–29. <http://consrev.mkri.id/index.php/jk/article/view/13110/219>.
- . “Masukan Untuk RUU PBJ: Mendesain Peradilan yang Efektif Untuk Melayani Sengketa Pengadaan.” *Jurnal Pengadaan* 4, no. 1 (Oct 2015) (2016): 82–95.
- . “Preventing Maladministration in Indonesian Public Procurement.” Utrecht University, 2017. <https://www.ris.uu.nl/ws/files/28739629/Wibowo.pdf>.
- Yana, Amanda Fitri, dan Rizky P P Karo Karo. “Kebijakan Tanda Tangan Elektronik Di Indonesia: Tantangan Dan Manfaat Perspektif Keadilan Bermartabat Di Masa Pandemi Covid-19.” In *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, 1:75–91. Bangka: Universitas Bangka Belitung, 2020.
- Yudho, Winarno, dan Heri Tjandrasari. “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (2017): 57–63.
- Zuhro, R Siti. “Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia.” *Jurnal*

Penelitian Politik 7, no. 1 (2010): 1–21.
<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/507/316>.

Makalah/Laporan/FGD

Arafat, Yasser. “Penegakan Hukum Administrasi.” *Youtube Channel*. Last modified 2020. Diakses Juli 22, 2021.
<https://www.youtube.com/watch?v=sMYyC4HFbfc>.

Harahap, Rudy M. “Workshop online-Peran BPKP dalam Pendampingan Pengadaan, Pelaksanaan Kontrak dan Audit,” 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=RE_kPuFCs_4.

Hivos. *Mengawal Pengadaan barang dan Jasa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP), 2018.

Institute for Development of Freedom of Information (IDFI). *Rekomendasi sistem pengadaan barang dan jasa republik indonesia*. Jakarta, 2018.

———. *Rekomendasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Republik Indonesia*. Jakarta, 2018.

Kepala Biro Hukum Sistem Informasi dan Kepegawaian. “SIARAN PERS Transformasi Digital dan Profesionalisme SDM Pengadaan.” *lkpp.go.id*. Last modified 2020. Diakses April 11, 2021.
<http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5968>.

———. “SIARAN PERS Transformasi Digital dan Profesionalisme SDM Pengadaan.” *lkpp.go.id*.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan(RUP) Nasional*. Jakarta, 2018.
<https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap>.

Mudjisantosa. “Pemberantasan Korupsi bukan Pemberantasan Kesalahan Prosedur Pengadaan,” 2020.

———. “Pinjam Bendera adalah Tipikor?” *www.mudjisantosa.net*. Last modified 2017. Diakses Juni 24, 2021. <http://www.mudjisantosa.net/2017/05/pinjam-bendera-adalah-tipikor.html>.

Mudzakkir. “Kriteria Perbuatan Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.” *FGD “Aspek Hukum TIPIKOR Pengadaan Barang/Jasa,”* 2020.

Muhammad Aris Supriyanto. *Pengadaan Langsung Barang / Jasa Pemerintah*. Makassar: KCOC 4 - Bela Pengadaan untuk UMKM Bangkit _ Balai Diklat Keuangan, 2020.

Ministry of Economic Affairs and Climate Policy. *Procurement Monitoring Report of the Netherlands*. Amsterdam, 2018.

Panggabean, Goppera. "FGD-Audit Forensik Persekongkolan dan Menelisik Kasus Pinjam Bendera dalam Pengadaan Barang dan Jasa," n.d.

Perdana, Reghi. "Bagan Bidang Hukum Yang Terkait Dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," 2012. <https://adoc.pub/reghi-perdana-sh-ilm.html>.

Pribadi, Banu Afwan. "Pemanfaatan Portal Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan) LKPP Pengadaan Langsung," 2020.

Pujo Hariyanto. "Pandangan dari sisi praktik," 2021.

Rachman Sukri. "Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Pengadaan Secara Elektronik bagi Pejabat Pengadaan," 2021.

Rachmina, Dwi. "Ruang Lingkup, Konteks, Kriteria Manajemen Risiko – Kriteria Risiko." *irmapa.org*. Last modified 2021. Diakses Agustus 31, 2021. <https://irmapa.org/ruang-lingkup-konteks-kriteria-manajemen-risiko-kriteria-risiko/>.

Setia Budi Arijanta. "FGD-Audit Forensik Persekongkolan dan Menelisik Kasus Pinjam Bendera dalam Pengadaan Barang dan Jasa." Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP), 2020.

Wibowo, Richo Andi. "Apa yang Indonesia bisa pertimbangkan dari cara Belanda mencegah korupsi pengadaan?," 2020.

Yudha Kandita, Atas. "Respon Pengelola Pengadaan Terhadap Proses TIPIKOR," 2020.

Website

Abu Samman Lubis. "Akuntabilitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *bppk.kemenkeu.go.id*. Last modified 2018. Diakses Juli 3, 2021. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-balikpapan-akuntabilitas-pejabat-pembuat-komitmen-ppk-dalam-proses-pengadaan-barangjasa-pemerintah-2019-11-05-eb0c9313/>.

Aditya Kurniawan. "AHOK : E-catalogue Permudah Proses Belanja Pemerintah." *latihan-lpse.lkpp.go.id*. Last modified 2015. Diakses Agustus 22, 2021. <https://latihan-lpse.lkpp.go.id/inaproclat/berita/Berita/AHOK-:-E-catalogue-Permudah-Proses-Belanja--Pemerintah>.

Agus Sahbani. "Begini Alasan MK Ubah Delik Tipikor." *www.hukumonline.com*. Last modified 2017. Diakses Desember 1, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5888f5b5bb039/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikor/>.

- Berita. "POGI Keberatan dr Ayu Ditangkap Terkait Dugaan Malpraktik di Manado." *health.detik.com*. Last modified 2013. Diakses Maret 27, 2021. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2409921/pogi-keberatan-dr-ayu-ditangkap-terkait-dugaan-malpraktik-di-manado>.
- detikNews. "DKI Beli 92 Truk Sampah Lewat e-catalog, Hemat Rp 2,9 M." *news.detik.com*. Last modified 2013. Diakses September 1, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-2435157/dki-beli-92-truk-sampah-lewat-e-catalog-hemat-rp-29-m>.
- Ferly Mondong. "Layanan Pengadaan Secara Elektronik." *supplychainindonesia.com*. Last modified 2018. Diakses September 1, 2021. <https://supplychainindonesia.com/sistem-pengadaan-secara-elektronik/>.
- Hadi, Ilman. "Siapa Sajakah Penegak Hukum di Indonesia?" *www.hukumonline.com*. Last modified 2012. Diakses Juli 22, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt502201cc74649/lembaga-penegak-hukum>.
- Hendra Kusuma. "Sri Mulyani Cerita Pentingnya Pengadaan Barang dan Jasa Bagi APBN." *detikFinance*. Last modified 2018. Diakses Desember 1, 2020. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4087734/sri-mulyani-cerita-pentingnya-pengadaan-barang-dan-jasa-bagi-apbn>.
- HRS. "Perusahaan Nazaruddin Kerap Pinjam Bendera." *www.hukumonline.com*. Last modified 2012. Diakses Februari 20, 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50c9d36340cd9/perusahaan-nazaruddin-kerap-pinjam-bendera>.
- Paulus Aluk Fajar Dwi Santo. "Akibat Hukum Strategi 'Pinjam Perusahaan' Dalam Lelang." *business-law.binus.ac.id*. Last modified 2016. Diakses Februari 20, 2019. <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/akibat-hukum-strategi-pinjam-perusahaan-dalam-lelang/>.
- Rzk-Berita Utama. "UU Korupsi Menganut Kerugian Negara Dalam Arti Formil." *www.hukumonline.com*. Last modified 2006. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14428/uu-korupsi-menganut-kerugian-negara-dalam-arti-formil/>.
- Suparman, Fana. "Pengadaan Barang dan Jasa Dominasi Perkara Korupsi yang Ditangani KPK." *www.beritasatu.com*. Last modified 2019. Diakses Maret 27, 2021. <https://www.beritasatu.com/nasional/589652/pengadaan-barang-dan-jasa-dominasi-perkara-korupsi-yang-ditangani-kpk>.
- Super User. "Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara." *acch.kpk.go.id*. Last modified 2018. Diakses November 4, 2019. <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>.
- Tashandra, Nabilla. "LPSE Jabar Sudah 100 Persen, Aher Raih E-Procurement

Award 2015.” *regional.kompas.com*. Last modified 2015. Diakses September 1, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2015/11/10/14592621/LPSE.Jabar.Sudah.100.Persen.Aher.Raih.E-Procurement.Award.2015>

Tim Pengelola Website LKPP. “Optimalisasi Anggaran Belanja Barang/Jasa Pemerintah 150 Triliun.” *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah*. Last modified 2019. Diakses April 20, 2021. <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5698>.

_____. “Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).” *lkpp.go.id*. Last modified 2013. Diakses Agustus 22, 2021. <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/802>.

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. *Modus-Modus Persekongkolan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Surabaya, 2018. <https://jatim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/12/Tulisan-Hukum-Persekongkolan-kor-binbangkum.pdf>.

Wildansyah, Samsudhuha. “ICW: Korupsi Pengadaan Barang 2017 Meningkatkan, Negara Rugi Rp 1 T.” *news.detik.com*. Last modified 2018. Diakses November 4, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-3885311/icw-korupsi-pengadaan-barang-2017-meningkat-negara-rugi-rp-1-t>.

